

Universitas Sriwijaya
***Kuto Besak* dari Keraton menjadi Benteng (1812-1822)**

Oleh: Dr. Farida, M.Si

Abstrak

Kajian ini berjudul “*Kuto Besak* dari Keraton menjadi Benteng (1812-1822)”. Permasalahan yang dikaji adalah “bagaimana kedudukan Keraton *Kuto Besak* dalam Kesultanan Palembang, dan mengapa terjadi perubahan nama dan fungsi menjadi Benteng *Kuto Besak*”. Tujuannya adalah “untuk menjelaskan kedudukan Keraton *Kuto Besak* dalam Kesultanan Palembang, juga untuk menjelaskan penyebab terjadinya perubahan nama, sekaligus fungsi dari keraton menjadi benteng”.

Kajian ini memanfaatkan arsip sebagai sumber primer yang diperoleh dari lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Data yang digunakan khususnya Bundel Palembang, dan Bangka. Sumber lain yaitu Koran dan jurnal yang didapat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), buku-buku, juga internet. Metode penelitian sejarah terdiri dari pengumpulan sumber (*heuristik*), kritik sumber, interpretasi sumber, dan rekonstruksi.

Keraton *Kuto Besak* adalah lambang supremasi sultan yang berkuasa. Di Kesultanan Palembang, posisi *Kuto Besak* sangat menentukan. Hal tersebut tidak saja dikarenakan keraton tersebut merupakan keraton terbesar, dan terkuat, juga terbukti kedudukan sultan di keraton dapat dilihat dari “restu” penguasa asing yang terlibat dalam berbagai konflik di Palembang. Sultan yang diakui oleh bangsa asing (Inggris/Belanda) akan menduduki keraton *Kuto Besak*, sedangkan yang tersisih harus keluar dari keraton tersebut. Berbagai peristiwa tersebut dapat dirunut mulai dari ekspedisi Inggris ke Palembang pada tahun 1812, pembagian kekuasaan pada 1819, dan perang penaklukan atas Palembang pada tahun 1821. Semua itu juga dapat dilihat dari lokasi sultan berkuasa, yaitu sultan yang berkuasa akan berkedudukan di *Kuto Besak*. Sebaliknya, sultan yang tidak mendapat “legitimasi” harus keluar dari keraton itu. Bukti terakhir dapat dilihat pascadibuangnya Sultan Badaruddin II dari Kesultanan Palembang, sultan yang naik tahta atas restu pemerintah kolonial Belanda harus keluar dari keraton *Kuto Besak*.

Kata kunci: *Kuto Besak*, lambang kekuasaan, perubahan.

Pendahuluan

Kesultanan Palembang dari tahun 1812 hingga 1821 dihadapkan pada beberapa kali peperangan. Peperangan pada 1812 behadapan dengan Inggris, sedangkan pada tahun 1819 terjadi dua kali peperangan melawan pihak kolonial Belanda. Puncaknya terjadi pada perang tahun 1821. Pada peperangan itu penguasa Palembang pada waktu itu yaitu Sultan Mahmud Badaruddin II harus mengakui keunggulan Belanda, sehingga di buang ke Ternate. Peristiwa tersebut menjadi akhir kedaulatan Palembang sebagai sebuah kesultanan yang merdeka. Berbagai peperangan tersebut, menyebabkan terjadinya “turun-naik” penguasa Palembang antara kakak-adik (Sultan Mahmud Badaruddin II, dan Sultan Ahmad Najamuddin II). Begitu pula singgasana tempat mereka berkuasa. Disebutkan bahwa penguasa sah akan berkedudukan di keraton *Kuto Besak*, sedangkan sultan yang diturunkan menempati keraton *Lamo* yang berada di sebelahnya. Begitu pula hal yang sama terjadi pada masa pemerintahan Belanda kedua sejak akhir tahun 1816 (Farida, 2012: 94-140).

Kata “keraton” berasal dari Bahasa Jawa, kata dasarnya “ratu” yang berarti “penguasa”. Kata ini mendapat awalan “ke” akhiran “an” sehingga menjadi ke-ratuan . Dari keratuan inilah menjadi “keraton”. Selanjutnya keraton dimaknai sebagai tempat seorang penguasa yaitu raja atau ratu memerintah, sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal (Perpustakaan cyber.blogspot.com). Dengan demikian, keraton adalah lambang supremasi, begitu pula *Kuto Besak* yang merupakan satu-satunya bangunan yang paling kokoh, dan terletak di lokasi yang sangat strategis di Kesultanan Palembang. Sementara itu, *Kuto Besak* selama ini dinamai Benteng *Kuto Besak* (BKB). Benteng adalah suatu infrastruktur yang berkaitan erat untuk kepentingan militer, dan dominasi kekuasaan. Dengan demikian, benteng berkaitan erat dengan strategi bertahan (tempat bertahan jika mendapat serangan dari musuh). Agar strategi itu efektif, maka benteng tersebut harus berada di lokasi yang strategis. Sisa-sisa benteng yang terdapat di Indonesia umumnya peninggalan kaum

kolonialis, karena sebagai pendatang, dan penjajah mereka membutuhkan benteng pertahanan, baik untuk bertahan maupun menyerang musuh-musuh mereka (Marihandono, Harto Juwono, dan Triana Wulandari, 2010:21-23; id.eikepedia.irg/wiki/benteng).

Timbul pertanyaan berdasarkan uraian di atas “bagaimana kedudukan Keraton *Kuto Besak* dalam Kesultanan Palembang, dan mengapa terjadi perubahan nama dan fungsi menjadi Benteng *Kuto Besak*”. Inilah yang akan menjadi permasalahan dalam kajian ini. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah “untuk menjelaskan kedudukan Keraton *Kuto Besak* dalam Kesultanan Palembang, juga untuk menjelaskan penyebab terjadinya perubahan nama, sekaligus fungsi dari keraton menjadi benteng”.

Metodologi

Kajian ini memanfaatkan arsip sebagai sumber primer. Arsip yang digunakan diambil dari lembaga penyimpanan arsip resmi negara, yakni Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Di lembaga ini sumber tentang sejarah Palembang khususnya zaman kolonial, sebagian besar belum tersentuh oleh para peneliti, baik peneliti lokal maupun Nasional. Dalam katalog Bundel Palembang, dan Bangka, arsip-arsip yang diperlukan untuk penulisan ini terdiri dari Bundel Palembang nomor 5.1, nomor 47.6, nomor 67, dan nomor 4 tahun 1971. Disamping itu, digunakan pula arsip *Algemeen Secretarie* berupa *Besluit Gouvernour Generaal*, nomor 11 tahun 1822, dan *Missive van H.M. de Kock*, nomor 19 tahun 1821. Sumber primer lain yang digunakan adalah leksikografi, yaitu, *Aardrijkskundig Woordenboek van Nederlandsch Indie*, karya P.J. Veth, tahun 1869.

Sumber primer lainnya diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Di perpustakaan ini berhasil diperoleh data penting, antara lain, koran yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu, yaitu *Bataviaasche Courant*, tahun 1821. Ditemukan pula koran Inggris terbitan tahun 1819 *The Asiatic Journal*. Selain itu ditemukan pula sumber sekunder berupa majalah sezaman yaitu:

Bijdrage van Koloniaal Instituut (BKI) yang memuat karya John A. Bastin, dan *Indisch Militair Tijdschrift* (IMT) berisi karya E.B. Kielstra. Buku-buku yang digunakan dalam kajian ini adalah karya William Thorn (salah seorang serdadu Inggris yang terlibat dalam peperangan di Palembang, yang juga berkedudukan sebagai wakil Markas Inggris), berjudul *The Conquest of Java*. Buku lain yang digunakan adalah disertasi M.O.Woelders, berjudul *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*. Terakhir menggunakan disertasi penulis yang belum diterbitkan, berjudul *Perebutan Kekuasaan di Kesultanan Palembang (1804—1825)*. Berbagai sumber di atas, dikaji dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang mengacu pada empat tahap, yaitu pengumpulan sumber (*heuristik*), kritik sumber, interpretasi sumber, dan rekonstruksi (Notosusanto, 1978: 11-12). Pada tahap akhir yaitu rekonstruksi, dilakukan penyusunan fakta-fakta dalam usaha menemukan satu kesatuan utuh dari fakta-fakta yang terpisah. Tujuannya untuk mengetahui keterkaitan antara peristiwa satu dengan lainnya. Sehingga menjadi suatu karya sejarah ilmiah.

Pembahasan

Sesuai dengan asal usulnya, Kesultanan Palembang terlahir dari penguasa-penguasa sebelumnya yang berasal dari Pulau Jawa pada pertengahan abad XVI. Berkembang terus, sehingga terbentuklah kesultanan dengan sultan pertamanya Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam (1659-1702). Latar belakang tersebut menyebabkan penamaan pusat kekuasaan raja/sultan dinamakan keraton atau beberapa sumber menuliskan pula kata “dalem” dengan makna sama yaitu tempat atau bangunan tempat raja memerintah.

Palembang memiliki beberapa keraton sebelum keraton *Kuto Besak* berdiri. Keraton pertama dikenal dengan nama *Kuto Gawang* berkedudukan di lokasi PT. Pupuk Sriwijaya. Pascadibumihanguskannya keraton tersebut, penguasa Palembang pada waktu itu mendirikan keraton yang terletak di daerah Beringin Janggut sekarang ini. Keraton berikutnya adalah keraton *Lamo* (kini menjadi lokasi

Museum Sultan Mahmud Badaruddin II). Keraton yang terakhir adalah *Kuto Besak*. Keraton ini berdiri pada 1780, atas prakarsa Sultan Muhammad Bahauddin. Keraton ini berdiri di tanah yang luas, berbentuk persegi panjang menghadap ke Sungai Musi, panjangnya 274,32 meter, dan lebar 182,88 meter. Dikelilingi tembok besar, tingginya mencapai 9,14 meter, tebal 2,13 meter. dengan empat kubu (bastion di setiap sudutnya). dengan sejumlah meriam yang terbuat dari besi dan kuningan. Keraton memiliki pelataran yang luas, balai agung, gerbang besar. Di dalamnya terdapat pula keputren, paseban, ruang tempat menerima tamu, tempat kediaman sultan dan permaisuri. Di tengah keraton terdapat kolam dengan perahu, taman, dan pohon buah-buahan. Di antara keraton *Kuto Besak* dan keraton *Lamo*, terdapat jalan menuju mesjid utama kerajaan (ANRI, Bundel Palembang No. 62.2; Veth, 1869: 656-667, Thorn, 2004: 158-159).

Balai Agung terdapat di kompleks keraton, yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu-tamu penting, sekaligus tempat sultan melakukan “hajatan”, antara lain tempat penobatan sultan. Pada peristiwa penting seperti itu, singgasana sultan dan segala atributnya (payung sutera kuning dan lainnya) telah disiapkan. Singgasana sultan berada pada posisi lebih tinggi tiga kaki (91sentimeter) dari lantai. Panji-panji kerajaan juga dikibarkan di dinding keraton. Sementara itu, perahu kebesaran dengan warna-warni indah telah siap dipinggir Sungai Musi di depan keraton (Thorn, 2004: 141, 148, 152-156). Demikian, gambaran sekilas tentang keraton terpenting di Kesultanan Palembang.

Keraton *Kuto Besak* adalah simbol kerajaan, tempat sultan memerintah seluruh wilayah kerajaannya, yang membentang dari Ampat Lawang dan Rejang di sebelah barat, Rawas di sebelah utara, Kisam dan Makakau di selatan, serta Pulau Bangka-Belitung di sebelah timur (ANRI, Bundel Palembang No. 62.2; Veth, 1869: 651). Kedudukan tersebut telah berlangsung sejak keraton itu berdiri. Dengan demikian, hanya sultan yang sah yang berhak mendiami keraton tersebut. Terbukti dengan terjadinya “turun-naik” sultan pada masa pemerintahan Inggris, dan Belanda, semuanya ditandai pula dengan keraton mana yang diduduki (*Kuto Besak*

atau *Lamo*). Jadi, sultan yang direstui/diakui oleh pihak kolonial, maka sultan tersebut memerintah dari dalam keraton *Kuto Besak*.

***Kuto Besak* Lambang Kekuasaan Sultan**

Keberadaan *Kuto Besak* sebagai keraton utama tidak dapat dilepaskan dari perannya dalam masa-masa sulit yang dihadapi oleh Kesultanan Palembang, khususnya pada masa peperangan. Dalam sejarah keraton itu, dihadapkan pada beberapa kali kondisi peperangan, baik posisi keraton sebagai lokasi peperangan, maupun sebagai benteng pertahanan. Peristiwa pertama terjadi pada April 1812, yaitu saat ekspedisi armada Inggris di bawah pimpinan Kolonel Gillespie¹. Dalam ekspedisi itu Inggris dengan mudah berhasil menduduki benteng Borang yang merupakan benteng terkuat saat itu. Akibatnya Sultan Badaruddin II terpaksa mundur ke *uluan* (Bailangu). Menyadari Sultan sudah tidak ada, lasykar yang berasal dari *uluan* berubah menjadi anarkis dan menimbulkan kekacauan khususnya di ibu kota Palembang. Gillespie mengerahkan pasukannya untuk menghadapi kondisi tersebut. Dalam peristiwa tersebut banyak menelan korban, baik dari pihak Palembang, maupun Belanda. Terbukti dari kesaksian Thorn bahwa ketika mereka tiba di keraton *Kuto Besak*, ditemukan genangan darah yang sangat banyak di gerbang besar dan pelatarannya, “seolah-olah kita berjalan menuju rumah penyembelihan” (Thorn, 2004: 141). Semua itu terjadi karena hebatnya pertempuran antara pasukan Palembang dan Inggris. Lasykar Palembang mempertahankan keraton yang telah tidak dihuni lagi oleh “pemiliknya” dengan sangat gigih. Saat keraton diduduki, pasukan

¹ Pascapendudukan loji Belanda di Sungai Aur (setelah yakin Belanda berhasil dikalahkan oleh Inggris, pada 14 September 1811 Sultan Badaruddin II memerintahkan para bangsawan untuk menduduki loji dan membawa para penghuninya keluar Palembang, ternyata mereka ditenggelamkan di Sungsang). Dalam rangka menghadapi serangan dari Inggris, Sultan Badaruddin II mempersiapkan diri, diantaranya adalah menyiapkan lasykar baik berasal dari ibu kota Palembang, maupun dari *uluan* (jumlahnya terbesar), membangun benteng-benteng pertahanan, dan persenjataannya (meriam, mesiu, *lila*, granat, *lila*, tombak, pedang, pisau, dan senapan (Woelders, 1975: 87-91).

Inggris menemukan 240 pucuk meriam. Sebuah pertahanan yang terancang dengan rapi, namun harus mengakui kekuatan lawan.

Pascamundurnya Sultan Badaruddin II ke *uluan*, Pangeran Adipati yang didukung Inggris, naik tahta dan mendiami *Kuto Besak*. Akan tetapi, Residen Inggris yang bernama Mayor Wiliam Robison merubah strategi, dengan melakukan pendekatan kepada Sultan Badaruddin II yang melakukan perlawanan sengit dari *uluan*. Robison menyadari bahwa pendekatan militer yang dilakukan Inggris bersama-sama dengan Sultan Najmauddin II tidak akan efektif menaklukkan Badaruddin II. Langkah yang diambilnya adalah melakukan pendekatan, dan perundingan dengan Sultan Badaruddin II. Usaha itu membuahkan hasil dengan ditandatanganinya perjanjian kedua belah pihak pada 29 Juni 1813. Tindak lanjut dari perjanjian tersebut, Sultan Badaruddin II kembali naik tahta (13 Juli 1813), dan menduduki keraton *Kuto Besak*. Sedangkan, Sultan Najamuddin II terpaksa harus kembali ke keraton *Lamo*. Akan tetapi, kondisi tersebut hanya berlangsung selama satu bulan. Kembali Sultan Badaruddin II harus meninggalkan *Kuto Besak*, karena kebijakan Robison ditolak oleh penguasa Inggris di Batavia yaitu Letnan Gubernur Raffles (Bastin, 1954: 74-75, Farida: 2012: 99-114).

Lima tahun kemudian hal yang sama kembali terjadi. Di bawah pemerintahan Belanda pascamundurnya Inggris (1816), Komisaris Muntinghe membagi kekuasaan atas Kesultanan Palembang antara Sultan Badaruddin II (Sultan Tuo), dan Sultan Najamuddin II (Sultan Mudo). Akibatnya, Sultan Najamuddin II harus keluar dari *Kuto Besak*, yang segera akan di huni Sultan Tuo. Semua ini terjadi karena pemerintah kolonial Belanda lebih menyukai Sultan Tuo yang menjadi musuh Inggris, berbeda dengan Sultan Mudo yang naik tahta atas perkenan Inggris (*ANRI*, Bundel Palembang No. 67; No. 5.1; *Bataviaasche Courant*, 4 Agustus 1821; *The Asiatic Journal*, Pebruari 1819). Dengan demikian, peristiwa tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya penguasa Palembang pada waktu itu adalah Sultan Tuo. Jadi, kekuasaan seorang sultan juga disimbolkan pada “lokasi” tempat ia memerintah. Sejak itu, Sultan Badaruddin II (Sultan Tuo) berkuasa atas

Kesultanan Palembang, sampai kekuasaannya berakhir dengan didudukinya keraton *Kuto Besak* pada Juni 1821.

Kesultanan Palembang pada tahun 1819 dihadapkan pada dua kali peperangan melawan kolonial Belanda. Pada peperangan pertama (Juni), keraton *Kuto Besak* menjadi maskas utama. Dalam pertempuran itu, lasykar Palembang mengarahkan serangannya dari keraton kepada kapal-kapal Belanda yang tengah ditempatkan di depan keraton. Di pihak lain, serdadu Belanda mengerahkan tembakan meriam (ukuran 4kg-12kg) dari darat, dan kapal perang (*Ajax*, *Eendracht* dan *Ebbe*, kapal *Elizabeth*, kapal-kapal lainnya, ditambah perahu-perahu). Serangan dahsyat ditujukan kepada keraton yang menjadi tempat pertahanan lasykar Palembang. Akan tetapi, serangan itu tidak mampu menembus kokohnya tembok keraton. Bahkan untuk membuka gerbangnya, mereka telah mengerahkan berbagai cara, namun tetap tidak berhasil sehingga posisi mereka terjepit. Peristiwa itu menimbulkan keheranan pada semua anggota pasukan Belanda. Kerugian yang diderita pihak Belanda adalah 9 terbunuh, dan 78 orang serdadu terluka. Pada peperangan kedua (Oktober 1819), *Kuto Besak* tidak terjamah oleh pihak musuh (Belanda), karena lasykar Palembang telah berhasil menghalau armada pasukan Belanda dari benteng terkuatnya yaitu benteng Pulau Kemaro (Farida, 2012: 194-199, 229-232).

Kejayaan keraton *Kuto Besak*² harus berakhir dengan dibuangnya Sultan Badaruddin II dan kerabatnya ke Ternate. Sultan dan seluruh lasykar Palembang tidak mampu membendung serangan besar-besaran³ yang dilancarkan oleh armada dan pasukan Belanda, di bawah pimpinan Jenderal Mayor de Kock pada peperangan Juni 1821. Sebelum meninggalkan keraton, Sultan telah memerintahkan

² Pada peperangan itu, keraton dipertahankan oleh 70 meriam (*Bataviaasch Courant*, 11 Juli 1821).

³ Tercatat dalam sumber-sumber Belanda bahwa dalam ekspedisi itu kekuatan mereka terdiri pasukan besar (700-800 orang serdadu), sebanyak 150-an perahu bersenjata, kapal-kapal perang, dan pengangkut antara lain *Van der Werf*, *Nassau*, *Eendracht*, *Henriette Elisabeth*, *Nieuwe Zeelust*, *Gezusters* dan *Elisabeth Johanna*, *Elisabeth Jacoba*, *Ajax*, *Zwaluwe*, *Venus*, *Zeepaard*, *Sirene*, *Race Horse*, *Mercurij*, *Graaf Bulow*, *Nieuwe Zealust*, *Koophandel*, *Admiraal Buijskes*, *Race Horse*, *Dageraad*, *Emerentia*, *Schipman*, *Jessi*, *Santa Maria*, (*Bataviaasche Courant*, 4 Agustus 1821; *Bataviaasche Courant*, 11 Juli 1821).

untuk menghancurkan benda-benda berharga yang terdapat di dalam keraton, agar tidak jatuh ke tangan pasukan Belanda. Itulah sebabnya, setelah keraton dikuasai pasukan Belanda, mereka hanya menemukan beberapa keping uang, emas, buku-buku, dan beberapa barang lainnya, serta 74 pucuk meriam (*Bataviasche Courant*, Rabu, 11 Juli 1821).

Sultan Badaruddin II dan keluarganya dibuang, maka Kesultanan Palembang memasuki era baru. Penguasa Belanda pada waktu itu menaikkan Prabu Anom (putera Sultan Najamuddin II) sebagai sultan Palembang⁴. Timbul pertanyaan, apakah sultan yang terakhir ini berdiam di keraton *Kuto Besak*? Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diangkat secara resmi pada 1 Juli 1821, Sultan Najamuddin III, dan *Susuhunan* menempati bangunan yang berjarak satu kali tembakan dari keraton *Kuto Besak* (*Bataviasche Courant*, 18 Desember 1824 nomor 51). Sementara itu, *Kuto Besak* difungsikan sebagai tempat kediaman Residen R. Keer⁵, dan penampungan empat ratus serdadu Belanda (*ANRI, Besluit van Govenour Generaal*, tanggal 14 Agustus 1822 Nomor: 11, *Bundel Algemeen secretarie; Bataviaasch Courant*, Sabtu, 4 Agustus 1821). Jadi, jelaslah bahwa keraton *Kuto Besak* adalah lambang supremasi sultan. Terbukti dengan tidak ditematkannya Sultan dan *Susuhunan* di keraton itu, karena yang berkuasa pada waktu itu adalah kolonial Belanda. *Kuto Besak* dijadikan markas besar tempat mereka melakukan berbagai aktifitas, sekaligus perlindungan dari serangan penduduk Palembang. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pada waktu itu, bahwa hanya keraton *Kuto Besak* satu-satunya bangunan paling besar dan kokoh. Di sisi

⁴ Pada 28 April 1821 di Bogor, telah terjadi kesepakatan antara Sultan Najamuddin II, Prabu Anom (atas nama Kesultanan Palembang), dan wakil penguasa Belanda (Ranier Dozy dan Christiaan Baud). Pada intinya memuat tentang pemulihan kekuasaan Sultan Najamuddin II, sedangkan pemerintahan akan dijalankan oleh Prabu Anom dengan gelar Ahmad Najamuddin III (Najamuddin II diberi gelar *Susuhunan*). Keduanya berkewajiban mematuhi semua pasal yang termaktub di dalam kontrak tersebut, yang secara umum bermakna tunduk kepada pemerintah Belanda (*ANRI*, *Bundel Palembang* No. 5.1; *ANRI*, No. 4, 1971: 89-90; *Bataviaasche Courant*, 4 Agustus 1821).

⁵ Residen Bangka-Belitung, yang juga berfungsi sebagai komandan militer (*ANRI*, *Bundel Palembang* No. 47.6).

lain, kondisi keraton *Lamo* tidak bisa diharapkan karena bangunannya lebih memprihatinkan⁶.

Kekuasaan kolonial Belanda di Palembang diserahkan dari Residen R. Keer kepada Komisaris Van Sevenhoven (sebelumnya menjabat sebagai residen di Cirebon) pada akhir 1821, Beberapa kebijakan yang ditempuhnya, antara lain melanjutkan penataan ulang pemerintahan, keamanan, dan infrastruktur di Palembang (*ANRI*, Bundel Palembang no 47.6). Keamanan, dan pemerintahan dikendalikan oleh pihak Belanda, karena sebagai sultan, Namuddin III tidak memiliki kekuatan dan kekayaan pascadibuang bersama-sama dengan *Susuhunan* ke Cianjur (1819-1821). Untuk mengamankan wilayah ibu kota Palembang, pemerintah Belanda menambah pasukan keamanan dari angkatan laut maupun darat. Mereka menempatkan kapal *Zeepaard*, *Ajax*, *Venus*, *Zeevaluwe*, dan *Emma* serta perahu-perahu di di depan keraton *Kuto Besak*. Pengamanan *Kuto Besak* ekstra ketat, karena keraton itu merupakan pusat pemerintahan, keamanan, maupun tempat tinggal pemerin tah di Palembang (*ANRI*, Bundel Palembang No. 47.6; Kielstra, 1892: 100).

Realisasi Keraton *Kuto Besak* menjadi Benteng

Setelah pemerintahan Belanda berjalan beberapa bulan di Kesultanan Palembang, mereka memandang perlu membangun sebuah benteng yang refresentatif sebagai usaha memantapkan kekuasaan. Sejak itu dicanangkan pembangunan benteng yang diberi nama *Frederik*. Jenderal Mayor de Kock sebagai orang yang memimpin ekspedisi Belanda menaklukkan Palembang, menyetujui pembangunan benteng tersebut.

Persetujuan itu ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan tersebut. Hasilnya dipaparkan oleh Komisaris J.I. van Sevenhoven dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Nomor:

⁶ Kondisi tersebut membuat Komisaris Sevenhoven menuntut agar dilakukan pembongkaran dan di atasnya dibangun bangunan baru yang “cocok” sebagai tempat tinggal, dan kantor residen, penguasa Belanda tertinggi di Kesultanan Palembang.

27 tertanggal 12 Juni 1822. Disebutkan bahwa pembangunannya akan berlangsung selama empat tahun. Sebagai sebuah benteng dari sebuah kekuasaan yang besar, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di samping itu, bahan material yang diperlukan juga sangat besar, antara lain: 9-24 juta potong batu laut, lima belas juta bata kecil, 68 ribu batu lantai ukuran besar dan kecil. Kebutuhan lain yang tidak kalah penting adalah sebanyak 184 ribu genting, 250 ton kapur, dan alat pencetak batu dalam jumlah yang besar, serta tidak kurang dari tiga puluh tungku pemanggang. Pembangunan dengan bahan baku yang besar tersebut, otomatis membutuhkan tenaga kerja yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menempuh beberapa cara, antara lain, *pertama* melakukan lelang atas berbagai pekerjaan dalam pembangunan tersebut, *kedua*, melimpahkan pengadaan kayu, dan kuli (Sebesar 58 persen dari kebutuhan kuli) dibebankan kepada Sultan, sedangkan total jumlah kuli yang diperlukan adalah 600 orang. Kedua cara di atas sulit dilakukan karena tidak ada yang tertarik mengikuti lelang tersebut. Sultan Najamuddin III tidak mampu mengerahkan jumlah tenaga kerja yang mencapai 350 orang yang akan bekerja selama empat tahun. Kendala lain yang menghadang adalah tidak adanya tanah yang cocok untuk pembuatan bata bata, dan genting di sekitar ibu kota Palembang. Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lebak, maka di ibu kota Palembang tidak mudah menemukan kayu, baik kayu untuk dijadikan bahan bangunan, maupun kayu untuk bahan bakar. Dengan demikian, bahan-bahan tersebut harus didatangkan dari daerah *uluan* dengan menggunakan perahu. Tidak kurang dari 25 ribu perahu untuk mengangkut berbagai bahan baku tersebut. Di tempat asalnya, juga memerlukan kuli tambahan untuk menebang kayu, mengangkut, pertukangan kayu, dan batu. Akibatnya, kebutuhan kuli melonjak mencapai seribu orang per hari. Mampukah jumlah tersebut dicapai? Sedangkan *matagawe* (pekerja) di Kesultanan ini hanya berjumlah sekitar delapan ribu orang (*ANRI, Besluit van Govenour Generaal*, tanggal 14 Agustus 1822 Nomor: 11, *Bundel Algemeen secretarie*).

Penduduk Palembang maksimal hanya mampu bekerja di proyek tersebut selama tiga bulan dalam setahun. Sebagian dari mereka juga dibebani tugas lain

yaitu membereskan tugas-tugas di gudang-gudang milik Belanda, membersihkan jalan, dan keraton. Jadi, banyak sekali kendala yang menghadang jika proyek pembangunan benteng tetap dilaksanakan.

Berbagai kesulitan yang akan dihadapi apabila proyek pembangunan benteng *Frederik* diteruskan, Sevenhoven menyatakan keberatannya kepada gubernur jenderal. Menurut analisis Sevenhoven, bahwa jika proyek tersebut tetap dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Apalagi kondisi penduduk Palembang pada waktu itu sangat sensitif akibat kalah perang, dan kehilangan pemimpinnya. Untuk itu Sevenhoven memberikan solusi, yaitu menyodorkan keraton *Kuto Besak* sebagai pengganti benteng *Frederik*. Menurutny, *Kuto Besak* sangat sesuai untuk dijadikan benteng yang sudah terbukti mampu menampung 400 orang serdadu. Selain itu, didekatnya dapat dibangun rumah untuk para perwira, dan pejabat tinggi Belanda. Bangunan di bagian tengah keraton dapat dijadikan tempat tinggal Sevenhoven selaku residen (*ANRI, Besluit van Govenour Generaal*, tanggal 14 Agustus 1822 Nomor: 11, *Bundel Algemeen secretarie; Bataviaasch Courant*, Sabtu, 4 Agustus 1821).

Berdasarkan hasil penelitian Kapten van der Wijck terhadap keraton *Koto Besak* (termaktub dalam memori pada 28 Juni 1822), dinyatakan bahwa sarana pertahanan keraton belum memadai untuk dijadikan sebagai pengganti benteng *Frederik*, namun, jika pembangunan benteng *Frederik* dilanjutkan akan terbentur dana yang sangat besar. Jalan yang terbaik adalah menggunakan salah satu bagian dari keraton sebagai benteng. Cara itu dinilai lebih hemat tenaga kerja, material dan biaya (*ANRI, missive van H.M. de Kock*, tanggal 18 Juli 1822 nomor 19, *Bundel Algemeen Secretarie*). Berbagai kajian tersebut, mendorong pemerintah Belanda meninjau ulang kebijakan untuk membangun benteng *Frederik* di ibu kota Kesultanan Palembang.

Berbagai pertimbangan tersebut, akhirnya Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal de Kock yang semula mendukung pembangunan benteng, menarik dukungannya. Ia menyadari betapa berat beban yang akan dipikul oleh pemerintah

Belanda jika pembangunannya tetap dipaksakan. Selanjutnya, Gubernur Jenderal mengeluarkan keputusan penetapan keraton Palembang sebagai benteng pertahanan. Fungsinya adalah untuk melindungi para pejabat dan garnisun Belanda di Palembang dari serangan penduduk. Mereka berkeyakinan bahwa merupakan suatu kesalahan besar jika residen, dan para pegawai sipil tinggal di luar benteng (*ANRI, Besluit van Governour Generaal*, tanggal 21 Agustus 1822 nomor 10, *Bundel Algemeen Secretarie*). Penamaan itu terus berlangsung selama masa pendudukan Belanda di Indonesia, dan terus berlangsung sampai dengan sekarang.

.....

Kesimpulan dan Saran

.....
Keraton *Kuto Besak* menduduki posisi yang sangat strategis di Kesultanan Palembang. Sejak didirikan oleh Sultan Muhammad Bahauddin (1780), maka *Kuto Besak* menjadi keraton sultan-sultan yang berkuasa di Palembang. Kehadiran bangsa asing (Inggris dan Belanda) sebagai penguasa di Palembang, menjadi bagian penting dalam “turun-naiknya” sultan-sultan di kerajaan ini. Berbagai peristiwa tersebut, juga ditandai dengan keraton tempat kedudukan para sultan tersebut. Sultan yang berkuasa atas “restu” Belanda, maka sultan tersebut bertahta di keraton *Kuto Besak*.

Perubahan nama dan fungsi keraton *Kuto Besak*, tidak dapat dilepaskan dari peran peran pihak kolonial (Belanda). Sebagai pihak yang menang, mereka membutuhkan tempat yang “cocok” dari berbagai segi, antara lain: kekokohan, kekuatan dari bangunan tersebut, sekaligus berada pada posisi yang strategis. Mereka membutuhkan tempat berlindung dari berbagai ancaman keamanan dari penduduk Palembang. Pilihan yang tepat untuk itu adalah menguasai *Kuto Besak*. Pilihan tersebut juga untuk menunjukkan bahwa merekalah penguasa di Kesultanan Palembang, meskipun kedudukan sultan tetap dipertahankan. Rakyat Kesultanan Palembang secara terpaksa dihadapkan pada kenyataan, bahwa mereka kehilangan

simbol supremasi sultan. Keputusan itu bertali kelindan dengan ketidakmampuan pemerintah kolonial tersebut membangun benteng *Frederik*. Sehingga masyarakat Palembang khususnya, dan Sumatera Selatan umumnya, kini hanya mengetahui bahwa bangunan yang sangat bersejarah itu adalah “benteng” dengan ucapan sederhana yaitu “BKB”. Akhirnya, adalah sebuah kekeliruan besar jika kita masih mempertahankan nama “benteng” untuk menyebut sebuah keraton terbesar, dan paling bersejarah di saat-saat terakhir berdirinya Kesultanan Palembang sebagai bangsa yang berdaulat.

.....
Selanjutnya kepemimpinan Belanda atas Kesultanan Palembang diserahkan kepada Komisaris Van Sevenhoven⁷. Ia bertugas di Palembang sejak Nopember 1821, melanjutkan pemerintahan sipil dari Letnan Kolonel Keer⁸. Sejak awal pemerintahannya, Sevenhoven berhubungan dengan para bangsawan dan penduduk Palembang. Ia mendukung dipertahankannya kekuasaan Sultan, namun pada kenyataannya tidak mudah mengembalikan kondisi Palembang pascaperang. Kekacauan terjadi di pusat maupun di *uluan*. Selanjutnya, Sevenhoven menugaskan pejabat sekretaris J.E. Sturler dan Asisten Residen D. Donker untuk mengemasi barang-barang milik Sultan Badaruddin II. Barang-barang itu antara lain, emas, naskah-naskah dan barang-barang lainnya (65 manuskrip di perpustakaan Universitas Leiden Belanda) yang berhasil ditemukan di keraton Palembang. Barang-barang itu

⁷ Dipilihnya Sevenhoven sebagai residen Palembang, karena dianggap berhasil menjalankan tugasnya sebagai residen Cirebon. Sosok Sevenhoven dianggap tepat untuk memerintah Palembang yang baru saja berhasil dikuasai oleh Belanda. Ia berfungsi sebagai penasehat Sultan Najamuddin III, walaupun pada kenyataannya Sevenhoven yang mengendalikan kekuasaan. Tugas utamanya adalah meneliti kondisi sosial, politik, dan ekonomi di kesultanan itu. Selanjutnya, melaporkan hasil penelitiannya kepada pemerintah pusat di Batavia. Menurut pengamatannya, dinyatakan bahwa pengaruh Sultan di *uluan* sangat kecil. Dengan demikian, Sultan tidak akan mampu memenuhi ketentuan kontrak (April 1821), antara lain tentang ketentuan mengembangkan perdagangan dengan membuka pasar-pasar, mencegah perdagangan budak dan lainnya (Kielstra, 1892:100-101; Woelders, 1975:25).

⁸ Keer menjabat sebagai Residen Palembang-Bangka sekaligus sebagai komandan militer, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 6 Mei 1821 nomor 3. Dibuatnya keputusan tersebut, mengingat sejak Juni 1819, pemerintahan Belanda di Palembang tidak ada. Penggabungan pemegang kekuasaan Bangka dan Palembang untuk memudahkan koordinasi dalam rangka menaklukkan Kesultanan Palembang, (*ANRI*, Bundel Palembang No. 47.6).

dimasukkan ke dalam kotak, dan disegel dengan cap pemerintah. Setelah itu kotak itu segera dikirimkan ke Batavia dengan menggunakan kapal perang *Zeepaard*. Pengemasan dan pengiriman barang-barang Sultan Badaruddin II itu tercatat dalam berita acara Direktur Kepala keuangan tanggal 21 Januari 1822 No,1 (*ANRI*, Bundel Palembang No. 1.8; No. 4, 1971: 90-91; Ikram, 2004: 51).

Hal mendesak lain untuk dilakukan Belanda pada waktu itu adalah mengembangkan perdagangan. Sebagaimana diketahui perdagangan mengalami kemunduran sejak pecahnya perang antara Kesultanan Palembang dan kolonial Belanda. Perdagangan semakin sulit dengan diblokadanya Sunsang. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal pada 8 Pebruari 1822 nomor 16 tentang pembangunan dermaga di Sunsang, dermaga itu nantinya akan berfungsi untuk menampung semua barang kebutuhan (ekspor-impor) pemerintah Belanda di Palembang. Selama pembangunan dermaga itu belum selesai, Sevenhoven menyiapkan perahu sebagai pemandu dan pelindung kapal-kapal milik Belanda yang tengah berlayar dan merapat di Sunsang. Sesungguhnya, kebijakan Belanda itu sudah berlangsung sejak 1819, karena penyeberangan dari Bangka ke Palembang melalui Sunsang sangat sulit dilakukan akibat banyaknya gangguan keamanan. Oleh karena itu, para nahkoda kapal Belanda telah mengajukan permohonan kepada Residen Palembang agar menyiapkan perahu-perahu untuk memudahkan pengamanan dalam pelayaran tersebut. Pada waktu itu tidak ada perahu yang membawa barang-barang milik Belanda ke ibu kota Palembang. Mereka juga tidak diperkenankan menggunakan jasa perahu swasta (dalam rangka blokade). Permintaan itu telah disampaikan oleh Residen Palembang kepada Gubernur Jenderal Van der Capellen di Batavia. Capellen memenuhi permintaan itu dengan mengeluarkan Surat Keputusan pada 25 Juni 1822 La H yang ditujukan kepada Departemen Angkatan Laut. Sejak itu masalah pengamanan di jalur Pulau Bangka sampai ibu kota Palembang dapat dikendalikan. Akan tetapi, secara umum perairan Bangka-Palembang tetap berada “ditangan” para bajak laut (*ANRI*, Bundel Palembang No. 4, 1971: 90-91).

Untuk menunjang lajunya perekonomian pada waktu itu, pemerintah Belanda mengembangkan *kalangan*, yaitu pasar-pasar tempat bertemunya produsen dari *uluan*

dengan konsumen di *iliran*. Manajemen pasar di ibu kota Palembang diserahkan oleh Sevenhoven kepada Kapten Cina Lim Bonkwee. Tugasnya mengutip sejumlah pungutan atas barang-barang yang dijual di pasar. Lim Bonkwee memegang posisi tersebut sampai akhir Maret 1824 (*ANRI*, Bundel Palembang No.3, Nomor 33, 12 April 1823). Kelompok etnis Cina sebagai pedagang perantara yang menguasai perdagangan di ibu kota Kesultanan Palembang mendapat kepercayaan untuk mengelola pasar. Konsep tersebut yang sudah dirancang Muntinghe sejak 1818, baru terlaksana tiga tahun kemudian. Seharusnya yang mengendalikan perdagangan dengan pasar-pasarnya adalah Sultan Najmuddin III. Akan tetapi, faktanya semua dikendalikan oleh Sevenhoven yang menyerahkan pengelolaannya kepada kapten Cina.

Di berbagai daerah Palembang khususnya di *uluan* gangguan keamanan terus berlangsung. Oleh karena itu, pemerintah pusat mempertimbangkan untuk menempatkan daerah *uluan* di bawah pemerintahan langsung pemerintah Belanda. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Belanda harus memiliki pengetahuan yang lengkap dan menyeluruh tentang sistem pemerintahan, potensi ekonomi, sumber pendapatan Sultan dan para bangsawan. Dari penelitian yang dibebankan pada Oktober 1822 disebutkan bahwa hasil pertanian Kesultanan Palembang pada waktu itu masih rendah. Atas dasar hal tersebut, Muntinghe⁹ mengusulkan agar pemerintah Belanda membimbing para penguasa lokal untuk memerintah daerahnya masing-masing. Meskipun, dalam pandangan penguasa Belanda, penduduk *uluan* adalah penduduk kasar dan tidak beradab, akan tetapi mereka dapat “dididik” untuk memerintah diri sendiri di bawah pengaruh kekuasaan Belanda. Muntinghe berharap dengan cara itu pemerintah Belanda akan mendapat keuntungan berlipat ganda dari daerah-daerah taklukan di *uluan*. Ia juga mengusulkan agar pemerintahan di Kesultanan Palembang diserahkan kepada keturunan sultan-sultan Palembang¹⁰,

⁹ Muntinghe pada saat itu menjabat sebagai anggota Dewan Hindia. Namun, sebagai orang yang pernah menjabat sebagai komisar di Palembang (1818-1819) dan telah melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat Palembang, Ia tetap memberikan pandangannya tentang cara terbaik memperkokoh kekuasaan Belanda di Palembang dan mengeksploitasinya.

¹⁰ Pada prinsipnya Sevenhoven memiliki pandangan yang sama yaitu menghapuskan kekuasaan feodal, untuk selanjutnya melakukan pembaharuan (Woelders, 1975: 25).

tetapi di bawah kendali pemerintah Belanda. Usul itu diterima oleh pemerintah Hindia Belanda (*ANRI*, Bundel Palembang No. 4, 1971: 90-91; Kielstra, 1892: 98). Jadi, walaupun Muntinghe pernah dianggap gagal di Palembang, tetapi usul-usulnya tetap diperhatikan mengingat pada masa pemerintahannya, pertama kali dilakukan penelitian tentang potensi daerah *uluan* yang besar.

Sebagai penguasa baru di wilayah yang sudah lama diidam-idamkan, pemerintah Belanda memperingati satu tahun kemenangan atas Kesultanan Palembang pada Senin, 24 Juni 1822. Peringatan pertama itu merupakan peringatan kemenangan yang mengharumkan bagi kekuatan armada laut Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor De Kock. Suatu kemenangan yang sangat berarti bagi pemerintah Belanda di Palembang khususnya, dan Hindia Belanda umumnya. Palembang berhasil dikuasai, setelah tiga kali peperangan besar. Menduduki Palembang berarti menguasai seluruh wilayah kesultanan yang meliputi wilayah *kepungutan*, *sindang* dan Bangka-Belitung. Peringatan dengan parade militer besar-besaran yang ditandai dengan tembakan penghormatan dari kapal perang *Arendt* dan Parade pasukan Angkatan Darat. Peringatan kemenangan itu dihadiri para panglima angkatan darat dan angkatan laut. Dalam peringatan kemenangan itu para perwira militer dan pejabat sipil berbaris di pelabuhan untuk melakukan penghormatan terhadap kapal-kapal yang lewat. Mereka mewujudkan kegembiraan itu dengan membagi-bagikan botol anggur (masing-masing setengah botol anggur) kepada para anggota militer Eropa, sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka. Untuk seratus orang anggota militer pribumi, diberikan hadiah seekor kerbau untuk dinikmati bersama dalam pesta tersebut. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Jenderal tanggal 14 Juli 1820 nomor 1. Pada upacara sore harinya dan jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Komisaris Van Sevenhoven, mereka mengundang Susuhunan Husin Dhiauddin dan Sultan Najamuddin III serta para pangeran dan para pemimpin orang Arab dan Cina (*ANRI, Register van Besluiten*, no. 54, 21 Juni 1822). Tidak ditemukan sumber nama dari tokoh Arab dan Cina yang menghadiri peristiwa tersebut.

Tindak lanjut dari suatu pemerintah yang permanen, pemerintah Belanda membutuhkan sebuah benteng yang layak. Pemerintah Hindia Belanda mencanangkan membangun benteng *Frederik* di Palembang. Pembangunannya diserahkan kepada Letnan Kolonel Insinyur Cochius (seorang ahli benteng), yang diperkirakan akan memakan waktu selama empat tahun. Pembangunan benteng itu membutuhkan dana, material dan tenaga manusia yang sangat besar. Berdasarkan laporan Sevenhoven nomor: 27 tertanggal 12 Juni 1822 kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, disebutkan bahwa besarnya kebutuhan untuk membangun benteng itu terdiri dari sembilan sampai 24 juta potong batu laut, 15 juta bata kecil, 68 ribu batu lantai ukuran besar dan kecil, 184 ribu genting, dan 250 ton kapur serta tiga puluh tunggu pencetak batu untuk waktu empat tahun. Langkah-langkah yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu: *pertama*, melaksanakan lelang, *kedua*, menyerahkan pengadaan semua kebutuhan kayu dan 350 orang kuli (total 600 orang kuli) kepada Sultan Palembang. Sisanya akan ditangani sendiri oleh pemerintah Belanda. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan benteng tersebut antara lain, tidak adanya tanah yang cocok untuk pembuatan batu bata dan genting di sekitar ibu kota Palembang. Selain itu, di sekitar ibu kota sulit diperoleh kayu bakar, kayu untuk bahan bangunan, dan 25 ribu perahu untuk pembangunan selama empat tahun. Semua kebutuhan tersebut harus didatangkan dari daerah-daerah lain, sehingga dibutuhkan sarana angkutan dan tenaga kerja tambahan (kuli angkut, kuli tebang kayu, tukang kayu dan tukang batu). Total tenaga kerja yang dibutuhkan lebih dari seribu orang per hari, sedangkan jumlah *matagawe* di Kesultanan Palembang hanya sekitar delapan ribu orang. Penduduk Palembang hanya mampu bekerja di proyek umum selama tiga bulan dalam setahun, karena mereka juga harus melakukan kerja harian di gudang-gudang milik Belanda, membersihkan jalan dan keraton. Dengan demikian, pemerintah Belanda akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kuli sebagaimana yang diharapkan (*ANRI, Besluit van Govenour Generaal*, tanggal 14 Agustus 1822 Nomor: 11, *Bundel Algemeen secretarie*).

Atas pertimbangan berbagai kesulitan yang akan dihadapi apabila proyek pembangunan benteng *Frederik* diteruskan, Sevenhoven menyatakan keberatannya

kepada Gubernur Jenderal. Menurutnya, apabila pembangunan benteng itu dipaksakan, akan timbul gejolak di Kesultanan Palembang. Sebagai gantinya, Sevenhoven menyodorkan keraton *Kuto Besak* untuk dijadikan benteng. Pada waktu itu keraton telah dijadikan tempat untuk pasukan Belanda. Lebih lanjut Sevenhoven menyatakan bahwa keraton *Kuto Besak* sangat sesuai untuk dijadikan benteng yang mampu menampung 400 orang serdadu. Bangunan di bagian tengah keraton cocok dijadikan tempat tinggal Sevenhoven. Di dekat keraton cocok dibangun tempat beristirahat para perwira dan pejabat tinggi Belanda di Palembang (*ANRI, Besluit van Govenour Generaal*, tanggal 14 Agustus 1822 Nomor: 11, *Bundel Algemeen secretarie; Bataviaasch Courant*, Sabtu, 4 Agustus 1821). Dilihat dari berbagai segi keraton, sangat memadai untuk dijadikan benteng. Di samping besar dan kokoh, keraton juga berada pada posisi yang sangat strategis.

Pada mulanya Jenderal Mayor De Kock menyatakan persetujuannya atas rencana pembangunan benteng *Frederik*. Ia tidak memikirkan kesulitan-kesulitan yang akan timbul dalam pembangunan benteng itu, antara lain kebutuhan tenaga kerja, material dan dana, sedangkan Keraton *lamo* (dekat keraton *Kuto Besak*) yang pada saat itu dihuni Sevenhoven kondisinya telah rapuh dan gelap. Kondisi itu juga membutuhkan penanganan segera. Sementara itu, banyak hal yang harus dilakukan guna membenahi keraton *Kuto Besak*. Berdasarkan hasil penelitian Kapten van der Wijck terhadap keraton *Koto Besak* (termaktub dalam memori pada 28 Juni 1822), dinyatakan bahwa sarana pertahanan keraton belum memadai untuk dijadikan benteng sebagai pengganti benteng *Frederik*. Akan tetapi, jika pembangunan benteng *Frederik* dilanjutkan akan terbentur dana yang sangat besar. Jalan yang terbaik adalah menggunakan salah satu bagian dari keraton sebagai benteng. Cara itu dinilai lebih hemat tenaga kerja, material dan biaya (*ANRI, Missive van H.M. de Kock*, tanggal 18 Juli 1822 nomor 19, *Bundel Algemeen Secretarie*).

Berdasarkan paparan Sevenhoven yang menyeluruh tentang berbagai kemungkinan mewujudkan benteng dengan biaya serendah mungkin, ditopang pula dengan kondisi keraton *Koto Besak* sebagai satu-satunya bangunan yang paling kokoh dan terletak di lokasi yang sangat strategis, Panglima Angkatan Darat Letnan

Jenderal de Kock mengubah pikirannya yang sebelumnya mendukung pembangunan benteng *Frederik*, menjadi menyetujui menjadikan keraton sebagai benteng. Selanjutnya, Gubernur Jenderal mengeluarkan keputusan tentang penetapan keraton Palembang sebagai benteng pertahanan. Tujuannya untuk melindungi para pejabat dan garnisun Belanda di Palembang dari serangan penduduk. Suatu kesalahan besar apabila residen dan para pegawai sipil tinggal di luar benteng. Untuk itu, Gubernur Jenderal memerintahkan Komisariss Palembang melaksanakan proyek tersebut bersama-sama dengan Kapten insinyur van der Wijck¹¹. Dalam mewujudkan rencana tersebut, mereka juga meminta persetujuan dari Sultan Palembang. Setelah segala persiapan selesai, pembangunan segera dilaksanakan (*ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal*, tanggal 21 Agustus 1822 nomor 10, *Bundel Algemeen Secretarie*).

Sebagai residen Palembang, Sevenhoven tetap memilih untuk tinggal di luar keraton yaitu di keraton *Kuto Lamo* (sebelah keraton *Kuto Besak*), yang dihuninya sejak ia bertugas di Kesultanan Palembang. Tampaknya Van Sevenhoven berubah pikiran dari keinginan awal untuk menghuni keraton *Kuto Besak*, menjadi tetap mendiami tempat semula yaitu keraton *Kuto Lamo*. Hal itu dilakukan karena kondisi keamanan di Palembang saat itu cukup kondusif. Di samping itu, pengamanan kediamannya menjadi satu kesatuan dengan keraton *Kuto Besak*. Hal itu juga merujuk pada kebiasaan para residen Belanda di Pulau Jawa dan Makassar yang menetap di luar benteng. Menurut Sevenhoven, agar seorang residen dapat menjalankan tugasnya dengan baik, hendaknya semua kebutuhan residen dipenuhi dengan baik khususnya tempat tinggal. Sebagai penguasa atas nama pemerintah Hindia Belanda di daerah, sudah selayaknya rumah residen berupa bangunan besar dengan pemandangan yang indah dan berada di lokasi strategis. Tempat yang paling pas untuk itu adalah keraton *lamo* yang berlokasi di sebelah keraton *Kuto Besak*. Pemandangannya sangat indah, yaitu Sungai Musi yang lebar, mampu dilayari oleh berbagai jenis kapal dan perahu

¹¹ Dipilihnya van der Wijck sebagai patner dalam proyek tersebut, karena di mata Sevenhoven, Van der Wijck adalah sosok yang berbakat, teliti, dan baik. Ia juga juga seorang mitra kerja yang menyenangkan dan telah lama tinggal di Palembang sehingga paham betul seluk beluk daerah tersebut (*ANRI, Besluit van Governour Generaal*, tanggal 21 Agustus 1822 nomor 10, *Bundel Algemeen Secretarie*).

dengan berbagai ukuran. Dalam pandangan Sevenhoven, kondisi seperti itu akan membuat seorang residen betah tinggal di tempat tersebut dan akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena setiap pemindahan seorang residen akan merugikan kepentingan pemerintah Belanda dan residen itu sendiri. Dibutuhkan waktu lama bagi seorang residen baru untuk mengenal medan tempatnya bertugas dan itu merupakan suatu pemborosan. Sementara itu, rumah yang dihuninya saat itu adalah keraton *Kuto lamo* yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Untuk itu, di lokasi yang sama hendaknya dibangun rumah residen yang layak. Akhirnya, pemerintah Belanda sepakat untuk menghancurkan bangunan lama dan menggantinya dengan bangunan baru yang megah. Bangunan itu yang nantinya menjadi kantor dan rumah Residen Van Sevenhoven dan residen-residen setelahnya (*ANRI, Besluit van Governour Generaal*, tanggal 21 Agustus 1822 nomor 10, *Bundel Algemeen Secretarie*).

Pada perkembangannya pemerintah Belanda semakin banyak campur tangan dalam berbagai persoalan di Kesultanan Palembang. Hal itu tidak terlepas dari semakin maraknya pelanggaran dan perlawanan terhadap berbagai ketentuan pemerintah di sejumlah daerah di Kesultanan Palembang. Menghadapi hal tersebut, Sultan tidak mampu berbuat banyak, karena tidak memiliki sarana dan prasarana. Menghadapi hal tersebut, pemerintah Belanda di Palembang memandang perlu untuk campur tangan langsung dalam pemerintahan khususnya di *uluan*¹². Usaha tersebut sekaligus untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, Sevenhoven menyampaikan usul kepada pemerintah di Batavia agar diizinkan untuk terlibat lebih dalam di Palembang. Usul itu diterima di Batavia pada Juli 1822, atas dasar usul tersebut, pada

¹² Menurut para pemimpin Belanda di Palembang (Sevenhoven, J.C. Reijns dan J. Kruseman), Sultan Najamuddin III adalah orang yang lemah, ia banyak dipengaruhi oleh golongan bangsawan bahkan dalam banyak hal Susuhunan Husin Dhiauddin lebih “menentukan” dari Sultan. Dalam pandangan para wakil pemerintah Belanda di Palembang, Sultan Najamuddin III tidak mampu memenuhi ketentuan Kontrak 1821, antara lain tentang memajukan perdagangan, memberantas perampokan dan perdagangan manusia, menghapuskan perdagangan budak (Kielstra, 1898: 100-103). Argumen yang dikemukakan oleh pihak Belanda sumir, karena dalam kondisi habis berperang dan baru kembali dari pembuangan, serta tidak memiliki kekayaan juga pengalaman memerintah bahkan di bawah kendali “penguasa” Belanda. Adalah sesuatu yang mustahil bagi Sultan Najamuddin III bebas bergerak untuk mewujudkan berbagai ketentuan yang menjeratnya. Dengan demikian, alasan-alasan yang dikemukakan terlihat hanya sebagai “alat” untuk mengesahkan berbagai “kebijakan” yang telah dan akan dilaksanakan atas kesultanan itu.

9 Oktober 1822 dibuat kontrak sementara dengan Sultan Najmuddin III, yang intinya memuat tentang ketidakmampuan Sultan menjalankan kontrak April 1821. Selanjutnya, pada Mei 1823 Sevenhoven menyerahkan laporan yang memuat penilaian tentang pemerintahan dan pelaksanaan sistem baru di Kesultanan Palembang. Akhirnya, atas dasar kontrak 9 Oktober 1822, pemerintah Hindia Belanda pada 3 Juli 1823 membuat kesepakatan dengan Sultan. Hasilnya pada 18 Agustus 1823 dibuat kontrak antara Sultan Najamudin III dan pemerintah kolonial Belanda. Kesepakatan itu disahkan pemerintah Hindia Belanda pada September 1823¹³. Dinyatakan bahwa, kekuasaan Sultan Palembang baik di bidang pemerintahan, keamanan, peradilan dan pajak dihapuskan. Sultan hanya berkuasa di bidang peradilan agama, yang menangani masalah perkawinan, perceraian dan waris. Pelaksanaan tugas tersebut diserahkan kepada seorang pangeran. Apabila suatu perkara penanganannya tidak dapat diselesaikan oleh pejabat yang bersangkutan, perkara tersebut diperbolehkan naik banding kepada Sultan. Di samping itu, Sultan akan memperoleh penghasilan berupa gaji bulanan sebesar 1000 dollar Spanyol, dengan kenaikan mencapai 500 dollar Spanyol. Para bangsawan juga akan mendapat tunjangan yang besarnya belum ditetapkan, akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah Belanda pada waktu itu. Lebih lanjut disebutkan, bahwa Sultan diperbolehkan duduk dalam pengadilan sipil di bawah pejabat pemerintah Belanda (*ANRI*, Bundel Palembang No.3, No 11B, 23 Januari 1823; No. 15 D VI; No. 4, 1971: 91, Veth, 1869: 655; Kielstra, 1892: 101-104).

Inilah riwayat Kesultanan Palembang setelah perjalanan panjang selama sebelas tahun, sejak kemelut pertama dengan naiknya Pangeran Adipati menggantikan kakaknya Sultan Badaruddin II pada 1812. Keinginan untuk berkuasa kembali di kerajaan itu, membuat Sultan Najamuddin II dan puteranya memanfaatkan peluang melalui kontrak pertama dengan Belanda (April 1821). Hanya membutuhkan waktu dua tahun bagi Susuhunan dan Sultan untuk berkuasa di Kesultanan Palembang, mereka sudah harus kehilangan semua kekuasaan kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam. Dalam masa pemerintahan mereka yang singkat,

¹³ Menurut Kielstra (1892: 104), kontrak itu disetujui pemerintah pusat pada 7 Oktober 1823.

keduanya cenderung hanya berkuasa sebagai simbol. Dengan demikian, jelaslah bahwa sesungguhnya keduanya tidak berkuasa sebagaimana penguasa yang memiliki otoritas di sebuah kerajaan setua dan sebesar Kesultanan Palembang. Dalam analisis ini, kembali dapat disimpulkan tesis yang dikemukakan oleh Nategaal (1996) bahwa keinginan Susuhunan dan Sultan untuk menunggangi Belanda demi kepentingan mereka untuk berkuasa di Kesultanan Palembang. Faktanya yang terjadi justru merekalah yang ditunggangi sehingga semua kekuasaan yang mereka miliki satu persatu dilucuti.

Untuk melaksanakan tugas-tugas harian Kesultanan Palembang, pemerintah Belanda mengangkat Pangeran Kramajaya (menantu Sultan Badaruddin II) sebagai perdana menteri. Tugas itu mulai diembannya pada 5 September 1823, setelah disumpah di hadapan Komisararis Sevenhoven di dalam keraton Palembang. Pelimpahan kekuasaan itu menuntut kemampuan untuk mengendalikan wilayah Kesultanan Palembang yang sangat luas. Tanpa pemerintahan yang kuat mustahil kekuasaan Belanda di daerah tersebut dapat berjalan dengan baik (*ANRI*, Bundel Palembang No. 15 D VII). Posisi Pangeran Kramajaya hanyalah pegawai yang digaji. Pengangkatannya semata-mata untuk memudahkan pihak kolonial Belanda untuk mengendalikan penduduk Palembang yang masih bersifat primordial.

Pascapenyerahan kekuasaan kepada pemerintah Belanda, berkembang berbagai wacana tentang masa depan Palembang. Salah satunya yang dikemukakan oleh Reynst dan Kruseman (pejabat semasa Komisararis van Sevenhoven). Keduanya berpendapat bahwa (dimuat dalam surat Reynst kepada Gubernur Jenderal pada 16 Oktober 1823 nomor 46) sebaiknya pemerintah Belanda tetap menggunakan penguasa pribumi (sultan dan beberapa orang pangeran) sebagai perantara dalam menjalankan pemerintahan. Untuk itu, perlu ada kesepakatan dengan Sultan untuk mengatur pemerintahan dan membatasi kekuasaannya. Strategi pemerintahan seperti itu dapat menekan biaya pelaksanaan pemerintahan di daerah itu menjadi sekitar f 200-300 ribu per tahun dengan keuntungan tahunan mencapai f 4000. Hal itu bisa dicapai dengan catatan “gaji” (uang pengakuan) untuk Sultan dikurangi. Pemerintah Belanda mutlak merencanakan secara matang, sebelum melakukan perubahan besar

atas Palembang yang terkenal subur dan padat penduduknya. Pemerintah Belanda di sana harus mendirikan sebuah benteng kecil tanpa armada laut, untuk memudahkan mengendalikan keamanan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menggabungkan daerah Bengkulu yang berbatasan dengan Palembang, guna memudahkan mengamankan daerah tersebut. Mengingat sejarah panjang kawasan tersebut sebagai daerah yang senantiasa bergolak, dengan terjadinya perampokan, penjarahan, dan perdagangan manusia¹⁴. Akan tetapi usul-usul itu ditolak Gubernur Jenderal pada 14 November 1823. Menurut penguasa Belanda itu, program penghematan yang akan dijalankan di Palembang adalah mengurangi jumlah pasukan dan pangkalan armada, sedangkan untuk menambah pemasukan, langkah yang akan diambil adalah memberlakukan pajak atas tanah dan perluasan pertanian (*ANRI*, Bundel Palembang No. 70.3).

Kebijakan tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan pemerintahan Belanda di Palembang. Dengan mengurangi pasukan, mengingat kondisi sudah cukup aman, biaya untuk serdadu dapat ditekan. Begitu pula dengan pengurangan pangkalan armada, berarti biaya pengeluaran dapat diminimalisir. Sesuai saran Sevenhoven, di Palembang diberlakukan pajak atas tanah yang akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda, mengingat tanah di Kesultanan Palembang sangat luas dan subur. Hal itu juga sangat menguntungkan jika pertanian diperluas.

Setelah kekuasaan diserahkan, bagi Susuhunan dan Sultan bukan berarti masalah selesai. Keduanya berada pada posisi sulit. Di satu sisi mereka harus mematuhi ketentuan penyerahan kekuasaan kepada Belanda. Akan tetapi, di sisi lain, mereka tidak mampu menolak tuntutan para bangsawan yang tetap menginginkan diberlakukannya berbagai ketentuan penyerahan wajib (tenaga manusia dan bahan makanan) yang selama ini mereka terima dari penduduk. Selama ini kehidupan golongan bangsawan dipenuhi dengan berbagai kemudahan dalam hidup. Mereka

¹⁴ Usul itu belum memungkinkan untuk diwujudkan karena asisten residen yang berkedudukan di Tebing Tinggi hanya memiliki kekuatan pasukan kecil. Akibatnya, tidak mampu menegakkan pemerintahan di daerah itu. Para pejabat pemerintah Belanda umumnya belum mengenal masyarakat yang sejak dahulu lebih berorientasi ke Bengkulu, mengingat jarak yang jauh lebih dekat ke Bengkulu dari pada ke Palembang (*ANRI*, Bundel Palembang No. 70.3; Kemp, 1900: 435).

sulit menerima perubahan-perubahan yang memaksa mereka untuk hidup seadanya tanpa berbagai “hak istimewa” yang biasa mereka terima. Keinginan itu tidak mampu mereka wujudkan karena tidak memiliki lagi kekuasaan. Sultan dan Susuhunan tidak mempunyai kekuasaan lagi, mereka tidak lebih dari symbol yang menyatakan bahwa di Palembang masih ada sultan dan susuhunan. Semua kekuasaan sudah dikendalikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kekecewaan mereka menumpuk dan berujung pada keinginan untuk melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Wujudnya adalah pada 1823 Sultan Najamuddin III menyewa dua orang penghulu senilai dua ratus dollar Spanyol untuk membunuh Komisaris Van Sevenhoven, tetapi usaha itu tidak berhasil. P.P. Roorda van Eysinga (pejabat keamanan pemerintah Hindia Belanda di Palembang) berhasil menggagalkannya (Veth, 1869: 655). Usaha pembunuhan itu membuat hubungan antara Sultan dan residen menjadi terganggu.

Di lain pihak, di berbagai daerah di *uluan* Palembang terjadi gangguan keamanan dalam berbagai bentuk, misalnya penyerangan dan perampokan yang dilakukan oleh orang-orang Pasemah. Pada waktu itu berkembang pula berita tentang perlawanan yang menolak pungutan pajak tanah¹⁵. Penolakan terhadap pungutan pajak terjadi di daerah Lematang. Akibatnya, *depati* Muin sebagai penguasa di daerah itu pada April 1824 diganti dengan Pangeran Suradiwangsa. Pergantian itu terjadi karena *depati* Muin dianggap tidak mampu mengurus pajak di daerahnya. Daerah-daerah lain di *uluan* juga bergolak, antara lain di Ogan dan Rawas. Untuk itu, pada 17 Juni 1824 Residen Reyns Palembang mengutus Asisten Residen untuk *uluan* H. de Sturler dan Demang Astramenggala ke *uluan* (*ANRI*, Bundel Palembang No. 46.4; *The Asiatic Journal*, vol. 20, 1825: 96).

Daerah Rawas selama kurun waktu 1823-1824 secara nyata menolak membayar pajak dengan melakukan berbagai kerusuhan. Pada 29 Juli 1824 Said (Sayid) Hamzah (orang Arab dari dusun Surolangun) bersama-sama dengan Abdulmanan dan Khatib Kedin berhasil mengajak penduduk untuk memberontak

¹⁵ Pemerintah Belanda menerapkan pajak tanah sebesar tiga gulden, pungutan pajak itu yang menjadi salah satu faktor penting mereka memberontak, sebagaimana dilansir oleh *Singapore Chroniek* (6 Januari 1825) (*The Asiatic Journal*, vol. 20, 1825: 96).

terhadap pemerintah kolonial Belanda. Menyikapi masalah tersebut, pemerintah Belanda sepakat untuk mengirimkan tujuh puluh orang serdadu pribumi di bawah pimpinan Pangeran Suradilaga dan Karanga (Rangga) Wirasentika ke Rawas pada 4 Agustus 1824. Hal itu ditempuh setelah usaha mereka untuk membawa tokoh-tokoh pemberontak tersebut untuk diadili di ibu kota mengalami kegagalan, Di samping itu, dikirim pula pasukan, persenjataan¹⁶ dan perbekalan serta sepuluh perahu di bawah komando Pangeran Puspadiraja dan Keranga Setawijaya (*depati* Rawas). Pasukan Pangeran Suradilaga juga membawa hadiah-hadiah berupa pakaian dan ikat kepala untuk dibagikan kepada para *depati* di sana. Tujuannya adalah untuk menarik simpati mereka dan bersedia mendukung pemerintah kolonial Belanda. Dalam menjalankan misinya, Pangeran Suradilaga juga menerapkan tradisi yang berlangsung semasa sultan-sultan Palembang melakukan kunjungan ke daerah *uluang*. Tradisi itu adalah *dusun-dusun* yang dilewati oleh pangeran itu ikut menyertakan penduduknya¹⁷ guna memperkuat rombongan tersebut. Di samping itu, terlibat pula beberapa orang tokoh dari keraton, antara lain Pangeran Kramayudo, Raden Mohamad Said, Raden Sabudin, Demang Wiratama, Demang Walo Sentiko Adenan, Kiagus Kling bin Tanjung, Kiagus Kling, Pangelima Tama, Pangelima Dalam, dan Nahuda Kahar. Pemerintah Belanda juga meminta tambahan pasukan militer dari Pulau Bangka. (*ANRI*, Bundel Palembang No. 5.5; No. 4, 1971: 91-92).

Dilihat dari persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, baik personil maupun peralatan persenjatan, dapat disimpulkan bahwa mereka menanggapi perlawanan dari penduduk *uluang* dengan serius. Pihak Belanda sudah banyak belajar dari pengalaman selama ini, bahwa sekecil apapun suatu pembangkangan harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan. Sebab penduduk Palembang terkenal militan

¹⁶ Besluit No. 83, 27 Agustus 1824 memuat tentang persenjataan yang dibawa terdiri dari tiga senapan logam satu pon, tiga senapan moncong letus setengah pon, 150 peluru satu pon, 150 peluru setengah pon, 200 pon mesiu artileri, dua periuk tembaga, dua *lepel* dengan penarik, enam tanduk mesiu, 2000 peluru senapan, 91 senapan, 100 pon mesiu infanteri, 150 tumpuk kertas pola, 70 batu api. Residen juga memberikan pinjaman berupa satu kumparan logam seberat 221 pon, delapan senapan, empat senapan bermoncong besar. Residen menyewa 41 senapan dan senapan bermoncong lebar seharga f2,5 (*ANRI*, Bundel Palembang No. 5.5).

¹⁷ Delapan orang dari Bailangu, empat puluh orang dari Sekayu, delapan orang dari Sukarami, seratus orang dari Lawang Wetan, dan lima puluh orang dari Suka Punjung (*ANRI*, Bundel Palembang No. 5.5).

dan dapat melakukan serangan secara tiba-tiba tanpa mereka mampu mempredikasikannya sebelumnya.

Ekspedisi yang dipimpin Pangeran Suradilaga berhadapan dengan pasukan Rawas. Pertempuran terjadi di sana, yang sebagian besar melibatkan sesama penduduk Palembang. Dalam pertempuran itu, jumlah pemberontak Rawas jauh lebih besar dari yang diperkirakan semula. Akibatnya pasukan yang dipimpin Pangeran Suradilaga tidak mampu mengatasi keadaan dan terpaksa mundur ke ibu kota (ANRI, Bundel Palembang No. 5.5; No. 4, 1971: 91-92). Dengan demikian, penyerahan kekuasaan dari Sultan kepada pemerintah Belanda diikuti berbagai peraturan yang menekan penduduk, misalnya pajak. Yang menyebabkan penduduk *uluan* memberontak.

Daftar Pustaka

Arsip dan Leksikografi

-
- ANRI Extract uit het verbaal gehouden bij Generaal Majoor opperbevelhebber der Palembangse expeditie en Kommisaris van het Gouvernement aldaar 1821*, Bundel Palembang, No. 47.6.
- ANRI, Nota rapporten betreffende Palembang over 1811 tot 1821*, Bundel Palembang No. 5.1
- ANRI, Jaarlijksch Verslag van de Residentie Palembang over 1834 en 1835*, Bundel Palembang No.62.2.
- ANRI, missive van H.M. de Kock*, tanggal 18 Juli 1822 nomor 19, Bundel *Algemeen Secretarie*
- ANRI, Besluit van Govenour Generaal*, tanggal 14 Agustus 1822 Nomor: 11, Bundel *Algemeen secretarie*
- ANRI, Besluit van Governour Generaal*, tanggal 21 Agustus 1822 nomor 10, Bundel *Algemeen Secretarie*
- Veth, P.J., *Aardrijkskundig Woordenboek van Nederlandsch Indie*, Amsterdam, P.N. van Kampen, 1859.

Koran

Bataviaasch Courant, Sabtu, 4 Agustus 1821

The Asiatic Journal, Pebruari 1819

Buku

Farida, 2012, *Perebutan Kekuasaan di Kesultanan Palembang (1804—1825)* (disertasi yang belum diterbitkan), Depok : FIB Universitas Indoensia.

.....
Marihandono, Harto Juwono, dan Triana Wulandari, 2010, *Sejarah Benteng Inggris di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, Dirjen Sejarah dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Thor, William, 2004, *The Conquest of Java*, Singapore: Periplus.

.....
Woelders, M.O., *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*, Leiden: VKI Publ. No.72, 1975.

Jurnal

Bastin, John A., *Palembang in 1811 and 1812*, dalam *BKI*, jilid 110, 1954.

Kielstra, E.B., 1892, *De Ondergang Van Het Palembangse Rijk*, de Gids.

Internet

PerpustakaanCyber.blogspot.com

id.wikipedia.org/wiki/benteng).